

**Rangkuman Hasil  
Forum Kepala BAPPEDA Provinsi Se-KTI XII  
Jakarta, 8 Juni 2017**

**I. Knowledge Sector Initiative (Bapak Petraca Karetji, Team Leader Knowledge Sector Initiative)**

- *Knowledge sector* sangat penting bagi KTI, karena pengetahuan merupakan syarat mutlak untuk melahirkan kebijakan pembangunan sebuah negara/daerah. Kebijakan yang tidak didasari pengetahuan akan sulit mewujudkan hasil yang optimal dan berkesinambungan dan jangka panjang. *Knowledge sector* harus dipandang sebagai investasi, bukan sebagai *cost* dalam mengejar ketertinggalan KTI dalam perspektif jangka panjang pembangunan NKRI.
- Hanya saja, selama ini pemerintah daerah di KTI belum banyak memanfaatkan hasil riset perguruan tinggi. Selain karena belum mampu menghasilkan hasil riset terapan dan masih terdapat 'keraguan' akan validasi data yang dihasilkan, juga belum mampu menghasilkan *policy recommendation* yang dapat diformulasikan sebagai kebijakan pembangunan daerah yang membumi dan dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah, selain permasalahan teknis yang seringkali berhadapan dengan proses politik dan aspek budaya lokal pada masing-masing daerah.
- Diperlukan riset-riset yang bersifat mikro dan formulasi kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi KTI, sambil lebih jauh melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini diterapkan pemerintah daerah agar dapat berjalan berkesinambungan.
- Mendesak untuk dilakukan penyebarluasan praktik-praktik cerdas dan pertukaran pengetahuan antar daerah di KTI, bahkan dengan KBI, sehingga perlu didorong membudayakan perumusan praktik cerdas daerah sebagai pengembangan *local knowledge* untuk dapat direplikasi daerah lainnya, salah satunya pengwilayahan komoditas dari konsep tri-konsepsi di Sulsel.

- Pola kemitraan tidak hanya sebatas antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, tetapi juga harus mencakup pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan pihak swasta dalam implementasi kebijakan yang berbasis riset.
- Perlu dipayungi regulasi pemerintah pusat terkait dengan pemanfaatan hasil penelitian untuk kebijakan pembangunan bagi pemerintah daerah untuk mampu bersinergi secara lebih optimal dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan KTI.
- Dalam perspektif jangka panjang, perlu disikapi melalui riset dari dampak kebijakan nasional yang mempengaruhi produktivitas daerah, misalnya pada sektor perikanan di KTI. Untuk itu KSI diharapkan hadir hingga pada tingkat pemerintah daerah.
- MoU pemerintah daerah dengan Perguruan Tinggi atau dengan lembaga riset lainnya harus menjadi komitmen bersama untuk lebih produktif dalam melahirkan kebijakan pembangunan daerah yang aplikatif di KTI dengan keragaman daerah masing-masing.

**II. Peran Bukti dan Para Pelaku di Perencanaan Kebijakan Pembangunan (Dr. Ir. Leonard VH Tampubolon, MA, Deputy Bidang Ekonomi, Bappenas dan Bapak Madjid Sallatu – Koordinator JiKTI)**

- Kebijakan perencanaan pembangunan harus bisa menjamin mekanisme “fakta-program-anggaran”. Dalam banyak hal perencanaan pembangunan nasional dan daerah mengabaikan hal tersebut, misalnya target pertumbuhan ekonomi dan reduksi kemiskinan harus dijamin proses mekanisme tersebut. Hal ini sudah banyak dilakukan di daerah, misalnya di Gorontalo, di Sidrap (Sulawesi Selatan).
- Penguatan Musrenbangnas yang berbasis bukti, melalui penguatan koordinasi perencanaan top-down dan bottom-up. Bahkan dimulai dari koordinasi perencanaan terendah dari tingkat desa/kelurahan. Konsekuensinya pengendalian perencanaan akan semakin sulit, sehingga perlu mengetahui potensi mulai dari tingkat desa, karena bisa terjadi menu yang ditawarkan tidak sesuai dengan kekuatan desa/kelurahan bersangkutan.

- Prioritas nasional yang dibebankan ke daerah, harus memperoleh dukungan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Nampaknya, selama ini regulasi yang mengatur hal ini belum berjalan efektif, sehingga dapat kontraproduktif dalam implementasi pembangunan KTI.
- Nampaknya perencanaan tata ruang harus lebih dioptimalkan, karena dalam banyak fakta RTRW tidak diperhatikan, misalnya basis data terpadu, tidak digunakan oleh K/L, sehingga kebijakan bisa tidak sejalan dengan daerah.
- Misalnya, pembangunan desa terpadu berbasis desa/kelurahan di NTT nampaknya tidak ketemu dengan apa yang di K/L. Di Papua, melalui Musrenbang khusus, dihasilkan prioritas kewilayahan, tetapi di K/L tidak pernah menjadi prioritas. Sepertinya, dicurigai Renstra dan Renja K/L tidak dikawal dengan baik, karena prioritas di RPJMN belum tentu menjadi prioritas dalam K/L.
- Salah satu yang dapat dimanfaatkan adalah EKPD yang dilakukan oleh Bappenas melalui perguruan tinggi lokal, mestinya mampu menjamin data valid untuk kesinambungan perencanaan berikutnya.
- Mekanisme perencanaan top-down dan bottom-up harus bisa menjadi filter perumusan program bagi daerah, dalam artian begitu tidak masuk dalam kerangka top-down atau bottom-up, maka program/kegiatan tersebut harus dicegah masuk dalam proses perencanaan pembangunan.
- Koordinasi kelembagaan Bappeda semestinya harus didesain sebagai matriks system, dimana bidang monev (data dan statistik) harus berperan sebagai *supporting* perumusan kebijakan perencanaan pada tiga bidang lainnya

### **III. Pertukaran Pengetahuan di Pusat Pengetahuan Bappenas dan Replikasi Praktik Cerdas (Bapak Erwin Dimas, SE, MEA, Msi, Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Bappenas)**

- Inisiator dan pelopor perubahan dari sebuah praktik cerdas harus dioptimalkan dalam mengawal replikasi praktik cerdas tersebut di daerah lain. Diperlukan bahasa-bahasa yang teknis dan aplikatif untuk memastikan implementasinya pada daerah yang baru.

- Jebakan *project oriented* pada replikasi praktik cerdas harus bisa dicegah dengan *meng-cut* ekspektasi anggaran dari APBN. Replikasi tidak boleh disertai dengan anggaran dari APBN, tetapi menjamin keberhasilannya yang sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah bersangkutan, sehingga akan mendorong kemauan daerah berdasarkan kepentingan kemajuan daerahnya. Praktik cerdas KTI oleh Bappenas harus dicegah sebagai program *top-down*, tetapi sebaliknya.
- Tantangan dari sebuah replikasi praktik cerdas adalah penguatan kohesi sosial bagi masyarakat lokal melalui persiapan sosial bagi kelompok sasaran program pembangunan di daerah baru. Bukan hanya dimaksudkan membumikan hasil riset/bukti, tetapi juga menjamin penerimaan masyarakat lokal terhadap program-program baru dari praktik cerdas yang sukses diterapkan di daerah lainnya.

#### **IV. Membawa Suara dari Timur Indonesia ke Garis Terdepan (Ibu Winarni Monoarfa, Pokja Forum KTI/Kordinator Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI)**

- Besar harapan dan optimisme untuk pembangunan KTI. KTI memiliki potensi SDA yang besar, menjadi prioritas nasional, memiliki banyak praktik cerdas pembangunan, serta memiliki forum interaksi pemangku kepentingan yang jarang dimiliki oleh kawasan lainnya.
- Komitmen pembangunan KTI mengedepankan: peningkatan produktivitas, penciptaan *value added*, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
- Merubah stigma kemiskinan dan sebagai daerah tertinggal, serta harus mampu dikembangkan yang lebih akseleratif dengan berbasis pengelolaan *social capital*
- Praktik cerdas KTI harus bisa direplikasi dan *scale-up* ke wilayah lain di Indonesia.
- Ketangguhan dan inspirasi KTI sebagai upaya mandiri harus lebih diaktifkan dan disadari oleh banyak pihak.
- Rendahnya investasi yang terhambat pertanahan.
- Kontribusi KTI terhadap PDB sangat rendah, Jawa-Sumatera 83%;

- Pola eksploitasi harus yang berkelanjutan, sekarang Sulbar sedang menyusun “RPJMD Green”, yang difasilitasi MCA Indonesia dan mestinya harus bisa dibagikan ke daerah lainnya.
- Kebijakan nasional yang pro-KTI harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin.
- Agenda penelitian untuk KTI.
- Memanfaatkan program-program yang bersifat *affirmative* terutama untuk pengembangan ASN KTI

#### V. Penutupan oleh Bapak Petraca Karetji (Team Leader Knowledge Sector Initiative)

Bapak Petra Karetji menutup kegiatan dengan memaparkan poin-poin dengan *alphabetical order* sebagai berikut:

- **Angka.** Bagaimana merumuskan bersama dan menghasilkan angka, data yang lebih baik, sehingga menghasilkan kajian-kajian yang semakin tajam ke depan.
- **Bahasa.** Tantangan dalam hal bahasa birokrat dan bahasa akedemis dalam penelitian. Bagaimana mengartikan hasil dari apa yang dikembangkan dari sebuah penelitian sehingga hasil penelitian terbahasakan sebagai investasi atau capaian. Beberapa hal dari fase 1 KSI sudah dihasilkan yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kapasitas peneliti sehingga bahasa ini bisa sejalan.
- **Concistency.** Konsistensi dan kordinasi perlu ditingkatkan dengan menghindari coba-coba yang selama ini dijalankan. Pelaksanaan program harus berdasarkan bukti konkrit dan pengalaman-pengalaman yang kuat sebelumnya.
- **Demand.** Bagaimana meningkatkan kejelasan permintaan terhadap kebutuhan penelitian dari pemerintah terutama dari BAPPEDA sehingga menjadi lebih jelas bagi para peneliti.
- **Evaluasi.** Bagaimana kejelian meneliti dan memanfaatkan hasil evaluasi program sehingga lebih baik.
- **Fulus, dana.** Pogram KSI berjalan berkat persetujuan dan dukungan Pemerintah Australia, DFAT dan BAPPENAS. Sudah ada komitmen untuk melihat lebih jauh ke sub-nasional. Sudah saatnya membicarakan tentang *matching fund*, bagaimana keberadaan BaKTI ke

depan. Sudah saatnya berbicara mengenai pendanaan inisiatif seperti Forum Kepala BAPPEDA Provinsi Se-KTI. Karena seperti sama-sama dilihat bahwa ini membawa suatu hasil yang baik untuk wilayah Indonesia Timur, tidak lagi bergantung pada donor dan juga sejauh mana melibatkan swasta dalam proses ini.

Tantangan untuk lima tahun ke depan adalah bagaimana terus menghidupkan Forum KTI sebagai garis depan untuk mendorong pembangunan di Kawasan Timur Indonesia yang semakin berbasis pengetahuan dan pembangunan yang inklusif.